



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUWARSO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 193067

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 355.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. Tanah Seluas 555 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 397 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 458 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 493.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA R 15 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, YAMAHA R 15 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA 1,2 G A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.800.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	241.938.792
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.102.238.792
III. HUTANG	Rp.	167.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	935.238.792

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.